



Pemberdayaan Masyarakat Desa Pogalan Kecamatan Pakis Menuju SDGs Desa Berbasis Infrastruktur

Gito Sugiyanto^{1*}, Ria Miftahul Jannah², Sigit³, Nur Singgih Arifin⁴

^{1,2,3}Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tidar

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar

gito.sugiyanto@untidar.ac.id*

Article History:

Received: 24-09-2024

Revised: 28-09-2024

Accepted: 29-09-2024

Keywords: Sustainable Development Goals; Pemberdayaan Masyarakat; Infrastruktur; Participatory Planning; Pogalan

Abstract: Mayoritas penduduk Indonesia tinggal di kawasan pedesaan, karena itu upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa membutuhkan langkah tepat dan sesuai kebutuhan. Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yaitu mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata melalui penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis pedesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Prioritas PKM berbasis SDGs pada pengembangan pedesaan (rural based development) melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa. Penyusunan program pembangunan desa selama ini dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun saat Musrenbang kadang masih didominasi oleh kebijakan dari kepala daerah, hasil reses anggota dewan, kunjungan anggota dewan, maupun program-program usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal ini mengakibatkan munculnya kecemburuan di tingkat pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian pemberdayaan masyarakat desa menuju SDGs Desa Berbasis Infrastruktur berlokasi di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Metode pelibatan masyarakat dengan pendekatan participatory planning. Melalui SDGs desa ini diterapkan participatory planning membangun desa yang mengadopsi kearifan lokal.

© 2024 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Masyarakat pada dasarnya adalah aktor yang menjadi subyek sekaligus obyek di dalam pembangunan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di kawasan pedesaan. Untuk itu pembangunan yang berbasis pedesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pembangunan wilayah yang optimal memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karenanya peran serta masyarakat secara aktif di dalam perencanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting untuk terciptanya pembangunan yang sesuai dengan karakteristik suatu wilayah (Harfis, 2019; Henry, 2014). Pembangunan partisipatif menjadi kunci utama dalam pembangunan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat (Novian dan

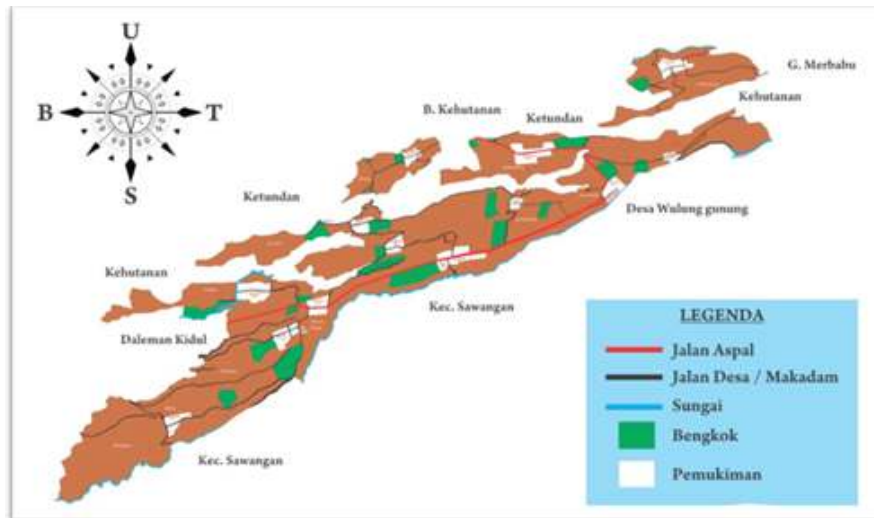
Machdum, 2020; Singgalen dan Kudubun, 2017). Kawasan pedesaan menjadi kawasan yang sangat penting untuk mendukung terjadinya keseimbangan pembangunan di semua wilayah. Pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya jumlah penduduk perkotaan yang semakin tinggi menjadi alasan mengapa kawasan pedesaan harus diperkuat sehingga dapat berperan sebagai kawasan *hinterland*. Untuk itu diperlukan pengembangan pedesaan (*rural based development*) melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat desa saat ini mempunyai permasalahan yang semakin kompleks sehingga membutuhkan pelayanan yang semakin baik dan terpadu. Beberapa permasalahan pembangunan yaitu: kemiskinan, pengangguran, *stunting* (gizi buruk), ketimpangan sosial, pertambahan jumlah penduduk, partisipasi dalam pendidikan, akses informasi dan komunikasi. Aspek-aspek tersebut menjadi permasalahan pembangunan karena menjadi penghambat proses pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya yang pada akhirnya akan menjadi beban dalam proses pembangunan (Hendrastomo dan Januarti, 2024). Oleh karenanya diperlukan pengenalan kondisi diri yang benar-benar dihadapi dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Siar, 2015). Bertolak dari kondisi ini maka sangat dibutuhkan pengidentifikasian karakteristik dasar desa yang berkonsentrasi pada potensi dan permasalahan desa baik pada aspek fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Aksesibilitas yang baik dan posisi kawasan pedesaan strategis karena pertumbuhan kawasan perkotaan dan tingginya migrasi ke kawasan perkotaan. Untuk itu pembangunan pedesaan harus mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, dan sektor kelembagaan desa.

Penyusunan program pembangunan desa selama ini dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun saat Musrenbang kadang masih didominasi oleh kebijakan dari kepala daerah, hasil reses anggota dewan, dan kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun juga program-program usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hal ini yang mengakibatkan munculnya kecemburuan dan akumulasi kekecewaan di tingkat pemerintahan desa yang sudah berupaya memenuhi kewajiban mereka dalam menyusun rencana program tetapi realisasinya masih minimum. Untuk itu diperlukan kajian keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan di wilayah pedesaan dan sekaligus untuk mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

Secara geografis dan administratif Desa Pogalan adalah salah satu desa di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Posisi Desa Pogalan terletak di bagian wilayah Timur Kabupaten Magelang berbatasan langsung dengan sebelah selatan adalah Kecamatan Sawangan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis, sebelah utara berbatasan dengan Desa Ketundan Kecamatan Pakis, serta di sebelah timur berbatasan dengan Gunung Merbabu dan Desa Wulunggunung Kecamatan Sawangan. Lahan di Desa Pogalan hampir sebagian berupa lahan pertanian dan hutan taman nasional. Luas wilayah Desa Pogalan yaitu: kawasan pemukiman sebesar 105 ha, ladang/tegalan sebesar 850 ha, hutan sebesar 7 ha, jumlah keseluruhan sebesar 962 ha. Jumlah dusun sebanyak 13 yaitu: Dusun Gerenden, Dusun Pujutan, Dusun Derpan, Dusun Keditan, Dusun Kekokan, Dusun Gandan, Dusun Kragilan, Dusun Sekendi, Dusun Gerdu, Dusun Kroyo, Dusun Klebutan, Dusun Pucung, dan Dusun Diwak. Secara topografis terletak pada ketinggian 1200 meter di atas

permukaan air laut. Peta wilayah Desa Pogalan, Kecamatan Pakis seperti ditunjukkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Peta wilayah Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang

METODE PELAKSANAAN

Amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bagaimana pemerintah desa mengatur dan mengelola potensi dan masalah yang ada di wilayahnya berdasarkan prakarsa masyarakat (Kementerian Sekretariat Negara, 2014). Dengan demikian pemerintah desa dituntut untuk bisa menyusun prioritas pembangunan di wilayahnya dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang ada sehingga pembangunan yang dilakukan dan tahapan indikasi pembangunannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa tersebut termasuk di Desa Pogalan. Selama ini penyusunan program-program pembangunan, baik fisik maupun non fisik, lebih banyak bersifat *top down* dengan pelibatan masyarakat yang minim dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang karena pembangunan yang selama ini dirasakan kurang mengakomodir prioritas masalah dan potensi yang dimiliki. Belum efektifnya pembangunan dirasakan terutama dalam sektor infrastruktur dan ekonomi. Salah satu yang diperkirakan menjadi penyebab ketidaktepatan indikasi pembangunan adalah belum tersedianya identifikasi karakteristik dasar dari Desa Pogalan.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui metode *participatory planning* menjadi pilihan untuk terciptanya kondisi yang diinginkan ke depan. Metode pelaksanaan dibuat secara sistematis sehingga luaran yang ditargetkan dari kegiatan kepada masyarakat dapat tercapai (Fadli dkk., 2020). Kebijakan, perencanaan, dan program-program keselamatan di negara maju disusun berdasarkan sistem pangkalan data yang telah terbangun (Sugiyanto dan Fadli, 2017) (Sugiyanto dkk., 2021).

Menurut Mustanir dkk. (2017) pelibatan masyarakat menggunakan pendekatan *participatory planning* memungkinkan masyarakat untuk dapat menilai potensi dan masalah yang ada di sekitarnya. Dengan demikian masyarakat akan terfasilitasi untuk merencanakan pembangunan yang sesuai untuk lingkungannya masing-masing. Langkah ini menjadi sangat berharga jika disesuaikan dengan kebutuhan akurasi data yang tinggi dalam menentukan rencana pembangunan sesuai untuk suatu wilayah tertentu. Untuk

itu diperlukan suatu kajian untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan pembangunan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pemahaman dan implementasi hasil sosialisasi akan membantu meningkatkan sumber daya manusia kelurahan maupun dalam proses pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dengan sumber daya manusia yang semakin berkembang, maka tujuan bersama akan terwujud dan dapat memperkuat identitas organisasi (Shanty dkk., 2024).

Kegiatan pengumpulan data di lapangan meliputi survei partisipatori dan pemetaan potensi dan permasalahan. Pemetaan yang dilakukan meliputi pemetaan aspek fisik dan aspek non fisik. Selanjutnya dilakukan analisis dan identifikasi potensi dan masalah pembangunan desa melalui *Participatory Rural Appraisal* dan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun serta penyusunan program pembangunan desa dan anggaran yang dibutuhkan. FGD dilakukan secara berjenjang, pertama dilakukan di tingkat dusun dan selanjutnya hasil FGD di tingkat dusun dibawa ke tingkat desa.

Tahapan perencanaan partisipatif (*participatory rural appraisal*) adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan lokal masyarakat di perdesaan
Metode yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat untuk memperoleh karakteristik dasar masyarakat. Wawancara dilakukan kepada warga masyarakat, ketua rukun tetangga, kepala dusun, dan perangkat desa.
2. Pengumpulan data dasar
Pengumpulan data mencakup data dasar tentang masyarakat, karakteristik daerah, situasi sumber daya, status sosial ekonomi, kondisi sarana dan prasarana desa, dan fakta-fakta relevan lainnya. Identifikasi potensi dan masalah pembangunan desa dilakukan melalui *participatory rural appraisal*.
3. Pembentukan kelompok kerja
Pada tahap ini dilakukan pembentukan kelompok kerja yang akan melakukan pemetaan aspek fisik dan aspek non fisik yang ada di perdesaan.
4. Perumusan tujuan
5. Pemutusan strategi yang akan dilakukan
Pada tahap ini diputuskan strategi yang akan dilakukan. Analisis dan identifikasi potensi dan masalah pembangunan desa dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun.
6. Pemastian kelayakan kegiatan
7. Penyiapan rencana kerja dan program kegiatan
8. Penyiapan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Nomor 9 yaitu mewujudkan desa ekonomi tumbuh merata melalui penyediaan infrastruktur sesuai kebutuhan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berbasis perdesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Salah satu metode yang digunakan yaitu dengan perencanaan partisipatif adalah proses dimana masyarakat berusaha untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu dengan secara sadar mendiagnosis masalah dan

memetakan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tenaga ahli dibutuhkan, tetapi hanya sebagai fasilitator (Food and Agriculture Organization, 2021). Metode pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan semua elemen dalam masyarakat dan para *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang (Mustanir dan Lubis, 2017). Akan tetapi menurut Marbyanto (2018) pendekatan dan metode partisipatif dalam perencanaan pembangunan nampaknya masih menjadi seperti retorika belaka. Kegiatan dalam perencanaan pembangunan masih sering didominasi oleh keputusan dan kebijakan para kepala daerah, hasil reses dan kunjungan anggota DPRD dan program-program usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Keadaan ini mengakibatkan kecemburuan dan akumulasi kekecewaan di tingkat pemerintahan desa yang sudah berupaya memenuhi kewajiban mereka dalam membuat rencana program tetapi realisasinya minimum.

Penelitian tentang peran masyarakat di dalam pembangunan sudah banyak dilakukan, terutama di negara-negara berkembang. Kristina dan Tyas (2018), Matdoan (2015), dan juga Fadil (2013) berkonsentrasi pada bagaimana pelibatan masyarakat dalam penataan lingkungan dengan meninjau pada bagaimana proses pelibatan masyarakat yang dilakukan. Sedangkan Susilowati dan Moerad (2016) mengidentifikasi bagaimana pelibatan masyarakat mengubah persepsi masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya Firmansyah dkk. (2014) mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Midgley (1995) mengkaji pembangunan kesejahteraan sosial. Mustanir dan Yasin (2018) menggunakan metode *Transect* sebagai metode perencanaan partisipatif dalam penggalan potensi dan permasalahan secara visual serta praktik pada perencanaan pembangunan Desa Tonrong. Hasil yang diperoleh adalah metode *Transect* merupakan hal yang baru dan tidak dikenal oleh masyarakat desa dalam sebuah perencanaan pembangunan. Pelibatan warga sekolah dan sekitar sekolah juga perlu dilakukan dalam pembangunan Kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan tingkat fatalitas korban kecelakaan (Sugiyanto dkk., 2015) (Sugiyanto dkk., 2016).

Peran pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *participatory planning* dalam pembangunan banyak menjadi konsentrasi dari riset-riset yang pernah dilakukan. Metode yang akan digunakan yaitu berdasarkan *Participatory Rural Appraisal* (Chambers dan Sukoco, 1996). *Participatory rural appraisal* adalah suatu pendekatan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengenalan, identifikasi, dan menganalisis kebutuhan untuk komunitasnya sendiri (Mustanir dan Yasin, 1996) dengan pasti apa yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya dengan metode *Participatory rural appraisal* masyarakat terlatih untuk mampu mengenali kondisi mereka sendiri sehingga mampu membuat rencana tindak ke depan untuk komunitasnya. Tingkatan partisipasi masyarakat ini akan tercapai apabila pengorganisasian masyarakat mengarah ke tahapan pembebasan diri sampai kepada tingkat partisipasi mandiri (*self-mobilisation*). Teknik pelaksanaan yang dilakukan pada kegiatan pengabdian tematik *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Pogalan adalah pendidikan, pendampingan yang dilengkapi dengan teknik belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

Kegiatan pengabdian tematik *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Pogalan dilaksanakan pada Bulan April-Oktober 2024 yang diprioritaskan dan berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*) melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pengabdian tematik SDGs Desa ini berkonsentrasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelibatan masyarakat desa terhadap proses dan jalannya

pembangunan di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian dapat diidentifikasi kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pelibatan masyarakat dengan menggunakan pendekatan *participatory planning* di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Identifikasi terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan pedesaan (*rural based development*) perlu dilakukan (Sugiyanto dkk., 2022). Warga masyarakat Desa Pogalan dilibatkan secara aktif dalam kegiatan *Participatory Rural Appraisal* dan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun serta penyusunan program pembangunan desa dan anggaran yang dibutuhkan. Dokumentasi kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun dan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian ditunjukkan pada Gambar 2 dan Gambar 3 berikut ini.



Gambar 2. Kegiatan *Focus Group Discussion* atau Diskusi Kelompok Terpumpun di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang



Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Tim Pengabdian Pada Acara *Focus Group Discussion* di Desa Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan berbasis perdesaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Melalui kegiatan pengabdian tematik *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa diprioritaskan dan berbasis pada pengembangan pedesaan (*rural based development*) melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui metode *participatory planning* menjadi pilihan untuk terciptanya kondisi yang diinginkan untuk desa ke depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Tidar (Untidar) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Untidar atas pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini melalui skim Skema Pengabdian Tematik Berbasis SDGs (PTBS) tahun anggaran 2024 dengan Surat Keputusan Nomor: 1577/UN57/HK.03.01/2024 tanggal 1 Maret 2024 dan nomor kontrak: 133/UN57/PM.01.01/III/2024 tanggal 1 Maret 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chambers, R. & Sukoco, Y. (1996). *PRA: Participatory Rural Appraisal, Memahami Desa secara Partisipatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- [2] Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(2), 251-262.
- [3] Fadli, A., Sugiyanto, G., & Zulfa, M. I. (2020). Upaya Mereduksi Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas melalui Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG). *Jurnal Warta LPM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)*, 23(2), 115-128. <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.9895>.
- [4] Firmansyah, A., Effendi, C., Wahiyuddin, L. O., Ridhawati, S., & Apriliyanti, D. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 66-78. <https://doi.org/10.22146/jkap.6877>.
- [5] Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). Training Module on Participatory Planning and Management. <http://www.fao.org/3/ad346e/ad346e06.htm>.
- [6] Harfis, H. (2019). Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 1(2), 30-37.
- [7] Hendrastomo, G. & Januarti, N. E. (2024). Pemberdayaan Masyarakat. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/course/view.php?id=2971/1000>.
- [8] Henry. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 118-126.
- [9] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [10] Kristina, D. & Tyas, W. P. (2018). Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Permukiman Kampung Nelayan. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 35-41. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.35-44>.
- [11] Marbyanto. (2008). Masalah dalam Perencanaan: Refleksi Singkat untuk Kasus Perencanaan dan Penganggaran di Kalimantan Timur.

- [12] Matdoan, U. (2015). Peranan Program PNPM-Mandiri Pedesaan dalam Mendorong Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Jurnal Biology Science and Education*, 4(1), 74-82. <http://dx.doi.org/10.33477/bs.v4i1.531>.
- [13] Midgley. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. <https://doi.org/10.4135/9781446221839>.
- [14] Mustanir, A. & Lubis, S. (2017). Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. In International Conference on Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG), Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 163, 316-319. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- [15] Mustanir, A. & Yasin, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Transect pada Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 8(2), 137-146.
- [16] Mustanir, A., Barisan, & Hamid, H. (2017). Participatory Rural Appraisal as The Participatory Planning Method of Development Planning. Indonesian Association for Public Administration (IAPA) International Conference-Towards Open Government: Finding The Whole-Government Approach.
- [17] Novian, M. N. & Machdum, S. V. (2020). Pembangunan Partisipatif di Kota Tangerang Selatan melalui Program Tangsel Youth Planner. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 173-181. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i2.18690>.
- [18] Siar, F. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui Program Corporate Social Responsibility di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(17), 47-59.
- [19] Singgalen, Y. A. & Kudubun, E. E. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata: Studi Kasus Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke-II di Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Cakrawala*, 6(2), 199-228.
- [20] Sugiyanto, G., Indriyati, E. W., Santi, M. Y., & Tanjung, M. Z. (2015). Efektivitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Sekolah Dasar (Studi kasus di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Semesta Teknik Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 18(2), 122-129. <https://doi.org/10.18196/st.v18i2.1813>.
- [21] Sugiyanto, G., Indriyati, E. W., Diaz, M. R. P. H., & Santi, M. Y. (2016). Evaluasi Penerapan Zona Selamat Sekolah di Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Media Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)*, 14(2), 174-181. <https://doi.org/10.22219/jmts.v14i2.3706>
- [22] Sugiyanto, G. & Fadli, A. (2017). Identifikasi Lokasi Rawan Kecelakaan Lalulintas dengan Metode Batas Kontrol Atas dan Upper Control Limit. *Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Fakultas Teknik UNNES*, 19(2), 128-135. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jtsp/article/view/10768>.
- [23] Sugiyanto, G., Pratama, S. B., Fadli, A., & Santi, M. Y. (2021). Implementasi Hasil Road Safety Audit (RSA) di Ruas Jalan Mayjen Sungkono, Blater, Purbalingga, Jawa Tengah. *Jurnal Warta LPM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)*, 24(1), 47-58. <https://doi.org/10.23917/warta.v24i1.10721>.
- [24] Sugiyanto, G., Hardini, P., Indriyati, E. W., & Purnomo, W. H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pendekatan "Participatory Planning" untuk Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan di Desa Serayu Larangan. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

- [25] Shanty, A. M. M., Yusditara, W., Patriansyah, W., Juniasih, T. E., & Lubis, A. L. (2024). Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Memperkuat Budaya Organisasi di Kelurahan Wek III Kota Padangsidempuan. *SWARNA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(6), 484-489. <https://doi.org/10.55681/swarna.v3i6.1355>.
- [26] Susilowati, E. & Moerad, S. K. (2016). Perubahan persepsi melalui pelibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PLTGU Perak. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 139-155. <http://dx.doi.org/10.12962/j24433527.v9i2.1623>.